



BULETIN

EDISI FEBRUARI

2021

KATA REDAKSI

Mengawali Tahun 2021 ini Buletin Bulanan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) hadir kembali untuk memberikan informasi pilihan dari setiap unit kerja di DJPI.

Pada Edisi ini kami menampilkan informasi mengenai pelantikan 48 Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI, kemudian informasi mengenai penetapan pemenang lelang pada Proyek KPBU Jalintim Riau dan Proyek KPBU SPAM Karian Serpong yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan.

Selain itu pada edisi kali ini juga terdapat informasi mengenai percepatan persiapan proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung dan serta liputan singkat mengenai pelaksanaan sosialisasi Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, dan keikutsertaan DJPI pada Rapat Pembahasan Proyek PPP Book dalam rangka memperbarui data rencana KPBU 2021.

Semoga sajian informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk para pembaca setia buletin DJPI, selamat membaca.

DAFTAR ISI

48 PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DJPI RESMI DILANTIK	1
PEMERINTAH DUKUNG PERCEPATAN PERSIAPAN PROYEK KPBU RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN BANDUNG	1
DJPI ADAKAN SOSIALISASI PERMEN PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021	2
KEMENTERIAN PUPR PERBARUI DATA RENCANA KPBU TAHUN 2021	2
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG LELANG PROYEK KPBU JALINTIM RIAU	3
KONSORSIUM K-WATER- PT. ADHI KARYA (PERSERO) MENANGI LELANG PROYEK KPBU SPAM KARIAN SERPONG	3





48 PEJABAT FUNSIONAL DI LINGKUNGAN DJPI RESMI DILANTIK

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto melantik 48 pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) bertempat di ruang rapat Lt 9 DJPI, Senin (8/2/2021).

Dalam sambutannya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk bekerja lebih semangat lagi, serta memberikan kontribusi yang optimal kepada unit kerja dimanapun para pejabat fungsional berada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



"Perlu disadari bahwa saudara-saudara sebagai Pejabat Fungsional, merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saudara-saudara sekalian menunjukkan kinerja yang lebih dan dapat menjadi panutan untuk pegawai lainnya." Ungkapnya.

Di akhir sambutan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan juga berharap pada era peralihan jabatan struktural menuju jabatan fungsional ini akan menjadi tantangan baru bagi pejabat fungsional agar bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Karena menurutnya, setiap jabatan fungsional telah memiliki uraian tugas yang jelas dengan angka kredit yang nilainya sudah ditentukan, dengan itu tidak ada jabatan fungsional yang kekurangan pekerjaan bahkan nantinya akan mendapat nilai plus jika membuat inovasi terkait pekerjaan yang dilakukan.

Hadir dalam acara tersebut Para Pejabat Tinggi Pratama, Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan DJPI. (Fen)

PEMERINTAH DUKUNG PERCEPATAN PERSIAPAN PROYEK KPBU RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN BANDUNG

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Persiapan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung yang dilaksanakan secara *online* melalui *zoom* dan tatap muka pada hari Jumat (29/01), bertempat di ruang rapat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI). Acara ini dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan Proyek KPBU Cisaranten Bina Harapan Bandung yang saat ini penyiapan Proyeknya masih dalam tahap finalisasi dokumen *Outline Business Case* (OBC) oleh Bappenas dan proses pengajuan PDF.

Sesuai kajian OBC Proyek KPBU Rusun Cisaranten dihasilkan tiga skema diantaranya terdapat dua skema yang terkait dengan alokasi APBN yaitu skema *Availability Payment* (AP) dan *Hybrid Annuity Model* (HAM). Khusus skema *Hybrid Annuity Model* (HAM)

di Indonesia regulasinya belum ada. Sedangkan untuk Penentuan alokasi AP akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selain itu juga disampaikan bahwa Pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung perlu ada penentuan dan kesepakatan terhadap pembagian tugas dalam pendelegasian kewenangan PJK yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Permen PUPR Nomor 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, Pasal 11 ayat (2) bahwa Tim KPBU dibentuk oleh PJK untuk membantu Pelaksanaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.

Untuk itu, saat ini DJPI sudah mengirimkan Surat Permohonan nama-nama yang akan berpartisipasi dalam Tim KPBU kepada Sekjen Kementerian PUPR dan Ditjen Perumahan. Selain itu akan segera mengirimkan Surat Permohonan yang sama kepada Ditjen Cipta Karya. Meskipun demikian dalam rapat tersebut perwakilan masing-masing unit organisasi telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dalam Tim KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung sesuai dengan pendelegasian kewenangannya.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Rumah Susun dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum serta Direktorat Jenderal Cipta karya yang diwakili oleh Kepala Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. (Fen)

DJPI ADAKAN SOSIALISASI PERMEN PUPR NOMOR 2 TAHUN 2021

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Kamis, (18/2) yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta melalui daring dengan Aplikasi *Zoom Meeting*.

Acara sosialisasi Permen PUPR ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait substansi tata cara pelaksanaan KPBU yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama antar unit organisasi di Kementerian PUPR dalam hal percepatan pelaksanaan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa dengan berlakunya Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, maka peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri

Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR (Berita Negara RI Tahun 2018 nomor 1156), resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyusunan peraturan pengganti tentang tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini dilakukan karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR, serta dalam upaya perbaikan Bisnis Proses pelaksanaan KPBU di lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu juga dijelaskan bahwa peraturan menteri ini disusun karena adanya perubahan substansi pada peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur yang diperbarui pada Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 Tahun 2020.

Pada akhir sambutan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan berharap Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR dalam rangka percepatan pemenuhan *funding gap* kebutuhan investasi infrastruktur di Kementerian PUPR hingga tahun 2024 yakni sebesar Rp1.435 Triliun.

Acara ini menghadirkan narasumber Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas; dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan DJPI serta dihadiri oleh sekitar 155 peserta yang terdiri dari seluruh perwakilan Unit Organisasi terkait di Kementerian PUPR, serta perwakilan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. (Fen)

KEMENTERIAN PUPR PERBARUI DATA RENCANA KPBU TAHUN 2021

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir dalam Rapat Pembahasan Proyek PPP *Book* melalui *teleconference*, Rabu (17/2) bersama Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas Turut hadir Perwakilan dari Direktorat Transportasi dan Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas. Perwakilan dari DJPI yang hadir dalam acara tersebut adalah dari setiap unit kerja antara lain dari Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, serta Perwakilan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain pembaruan Daftar Rencana KPBU yang dilakukan secara berkala dan penjelasan mengenai Tahapan Penyusunan Daftar Rencana KPBU berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian, disebutkan pula 20 Proyek Kementerian PUPR yang masuk dalam Daftar Rencana KPBU TA. 2020, yaitu terdiri dari 1 Proyek yang tidak masuk ke dalam Daftar Rencana KPBU TA. 2021 karena memperoleh penolakan (Bendungan Pasir Kopo), 5 Proyek sudah masuk dalam proses Transaksi, 3 Proyek dalam Proses Penyiapan (*Under Preparation*), dan 11 Proyek Siap Ditawarkan (*Ready to Offer*).

Kementerian PUPR juga mengusulkan 2 usulan baru proyek untuk masuk ke dalam Daftar Rencana KPBU TA. 2021, yaitu Jalan Tol Malang — Kapanjen dan SPAM Ir. H. Djuanda (Jatiluhur II). Kedua proyek tersebut telah memperoleh rewiu dari Direktorat PSSPP serta dari Direktorat Sektor di Bappenas dan disepakati untuk masuk ke dalam Daftar Rencana KPBU TA. 2021 dengan status "Dalam Penyiapan (*Under Preparation*)". Selanjutnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, DJPI akan berkoordinasi dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen. SDA dan Pemerintah Provinsi Bali terkait penambahan lingkup SPAB pada KPBU SPAM Ayung. (IND/Fen)

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG LELANG PROYEK KPBU JALINTIM RIAU

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk paket konstruksi preservasi jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau (Jalintim Riau). Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau merupakan Proyek KPBU atas prakarsa Kementerian PUPR dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp.585,30 Miliar.

Ruas jalan yang direkonstruksi atau dipreservasi terdiri dari Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Batas Kabupaten Pelalawan dengan panjang 3,60 kilometer, Jalan Pelalawan-Sikijang Mati dengan panjang 9,10 kilometer dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago dengan panjang 30,30 kilometer, total keseluruhan yaitu 43

kilometer. Adapun masa kerja sama yang ditentukan dalam proyek tersebut adalah 15 tahun, yang terdiri atas 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.

Proyek KPBU Jalintim Riau berlokasi di Kabupaten Pelalawan merupakan bagian dari Jalan Nasional di Lintas Timur Sumatera yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto menjelaskan bahwa bentuk kerja sama Pemerintah dalam proyek ini adalah bangun guna serah atau *build operate transfer*.

Proyek-proyek tersebut menggunakan skema *availability payment* atau pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan. Pembayaran ketersediaan layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (Fen)

KONSORSIUM K WATER-PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK MENANGI LELANG PROYEK KPBU SPAM KARIAN SERPONG



Panitia Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional telah menetapkan Konsorsium K-Water - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU SPAM Regional Karian - Serpong. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelelangan.

Proyek KPBU SPAM Karian Serpong merupakan proyek KPBU *unsolicited* atas prakarsa Konsorsium K-Water dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proyek ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp2,43 Triliun dengan masa kontrak 33 tahun. Adapun total kapasitas SPAM Regional tersebut yaitu 4.600 liter per detik atau lpd. Sistem ini nantinya akan melayani area DKI Jakarta (3.200 liter per detik), Tangerang (750 lpd), dan Tangerang Selatan (650 lpd) dengan pipa transmisi sepanjang 25,2 kilometer.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya beberapa waktu lalu berharap konstruksi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dapat segera dimulai. Hal ini dikarenakan selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya perbaikan lingkungan/*environmental remediation* bagi Kota Jakarta, khususnya untuk mencegah terus menurunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di Kota Jakarta. (Fen)

PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP

PENASEHAT

Ir. Irma Yanti, MT

PENGARAH

- Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- Ir. Arvi Argyantoro, MA
- Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T, MDM
- R. Haryo Bakti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

- Dedy S. Budisusetyo, SH, MT

REDAKTUR PELAKSANA

- Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

REDAKSI

- Shara Vadya, S.I. Kom

EDITOR

- Anggoro Widyastika, SH, MH
- Putrawan, SH

DESAINER

- Fahmi Nurhuda S.Ds
- Michael Adha

FOTOGRAFER

- Dwi Cristianto

REPORTER

- Komarudin

SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE, MSi
- Yudhistira Adi Nugroho, SH

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK,
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JL. RADEN PATAH 1 NO. 1 KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON/FAX: (021) 7200793

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.
Hak Cipta dilindungi undang-undang.